

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Perkembangan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba yang melanda dunia berimbas juga ke tanah air, perkembangannya begitu pesat sehingga sangat mengkhawatirkan bagi kelangsungan hidup manusia. Narkoba juga sudah menyebar sampai ke seluruh wilayah tanah air dan menyasar ke berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

Sasaran peredaran narkoba tidak hanya tempat hiburan malam, tetapi juga merambah ke daerah pemukiman, kampus, sekolah, rumah kos dan bahkan di lingkungan rumah tangga dengan berbagai modus dan teknologi baru. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba berimplikasi besar terhadap kesehatan dan kerugian social-ekonomi Negara. Awal tahun 2021 Kepala BNN RI Dr. Petrus R Golose menegaskan dan mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk Perang melawan narkoba dengan taglinenya WAR ON DRUGS.

Hal ini selaras dengan amanat Presiden RI Joko Widodo, dimana sejak 2015 telah memberikan peringatan bahwa Indonesia sudah memasuki era darurat Narkoba. Untuk itu kita perlu memacu kinerja di bidang P4GN, khususnya meningkatkan keberdayaan masyarakat yang berpartisipasi dan mandiri dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Indonesia tengah menghadapi tiga masalah utama yang sangat serius.

Masalah tersebut adalah terorisme, intoleransi, dan narkoba. Sejak Presiden RI Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia berada dalam situasi darurat narkoba lima tahun silam, upaya penanganan semakin gencar dilakukan. BNN bekerjasama dengan semua institusi baik pemerintah maupun swasta juga seluruh komponen masyarakat secara sinergis melakukan upaya P4GN. Melalui pendekatan supply reduction dan demand reduction, benang kusut permasalahan narkoba diurai dan dicari akar masalahnya. Penanganan supply reduction melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba sementara penanganan demand reduction melalui upaya rehabilitasi, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat.

Ancaman narkoba semakin lama terus meningkat, bukan hanya di Indonesia tetapi juga hampir di seluruh negara mengalami permasalahan ini. Narkoba telah

masuk hingga hampir di seluruh elemen masyarakat, tanpa memandang status, tingkat pendidikan ataupun penggolongan strata lainnya.

Bahkan bila dilihat dari sisi usia yang menjadi penyalah guna narkoba, semakin lama kecenderungan para penyalah guna didominasi oleh mereka yang muda usianya. Sebagai sosok yang akan mengemban peranan penting dalam pembangunan menyambut Indonesia Emas maka diperlukan upaya yang komprehensif guna menekan laju angka penyalahgunaan narkoba melalui peningkatan ketahanan pada diri anak dan remaja. Berdasarkan hasil penelitian BNN dengan LIPI tahun 2019, diperkirakan angka prevalensi Nasional untuk pernah pakai Narkoba sebesar 2,40% setara dengan 4.534.744 jiwa, sedangkan setahun pakai narkoba 1,80% setara dengan 3.419.188 jiwa. Angka prevalensi 2,40% bisa dikatakan 240 dari 10.000 penduduk Indonesia berumur 14 sd 64 tahun terpapar pernah memakai Narkoba. Pulau Nias dengan penduduk sebanyak 143.319 jiwa dikenal sebagai daerah wisata dan budaya.

Badan Narkotika Nasional mencatat ada 12.890 kasus narkoba hingga triwulan I 2021. Sumatra Utara menjadi provinsi dengan jumlah kasus narkoba terbanyak. Penanganan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba memerlukan kerja keras dan keseriusan dari seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan permasalahan Narkoba merupakan kejahatan yang luar biasa, terorganisir, tanpa batas (global), dan sudah multi etnis (melibatkan berbagai suku bangsa). Penyalahgunaan narkoba sudah menjadi ancaman serius bagi Indonesia. Penanganan permasalahan kondisi tersebut merupakan masalah bersama antara pemerintah dan masyarakat sehingga memerlukan suatu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang bersatu padu dalam suatu gerakan bersama untuk melaksanakan strategi yang memadukan pengurangan pemasukan (supply reduction) dan pengurangan permintaan (demand reduction)” sehingga Program Pencegahan, Pemberantasan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dapat berhasil.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai vocal point penanggulangan Narkoba di tanah air telah melakukan berbagai upaya penanggulangan permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba, melalui Bidang Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, dan Pemberantasan serta meningkatkan kerjasama nasional dan internasional guna mencegah Narkoba masuk ke Indonesia. Di daerah, BNN memiliki perwakilan yang disebut Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan Badan Narkotika Nasional Kab/Kota (BNNKab/Kota).

Dalam rangka menanggulangi permasalahan narkoba, BNNP Sumatera Utara, serta BNNK Gunungsitoli telah melaksanakan kegiatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Adapun Laporan Kinerja sebagai kewajiban instansi untuk melaporkan Kinerja kepada Kepala BNN sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNN. Adapun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BNNK Gunungsitoli. Hal tersebut sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

Visi:

Menjadi Lembaga Non Kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif Lainnya di Indonesia.

Misi:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya (narkoba)
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN.
5. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN dan diserahkan kepada Presiden.

Tugas Pokok BNN

Kedudukan:

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional disebut BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. BNN dipimpin oleh Kepala.

Tugas:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
4. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang di selenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Memantau, mengarahkan dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Melalui kerja sama bilateral dan multiteral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
8. Mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

Selain tugas sebagaimana diatas, BNN juga bertugas menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.

Fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.

3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.

18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.

Dasar Hukum Badan Narkotika Nasional

1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Instruksi Presiden No 12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011 – 2015;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kota/Kota.

Kewenangan BNNK

Kewenangan BNNK Gunungsitoli merupakan wewenang BNN dalam wilayah Kota terlihat secara implisit pada tugas pokoknya, namun kewenangan yang dikhususkan oleh undang-undang adalah tugas dalam melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. BNNK Gunungsitoli berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan.

RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA

Menyusun Rencana Strategis merupakan kewajiban bagi setiap K/L, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Guna menindaklanjuti amanat tersebut, BNN menyusun Renstra BNN Tahun 2020–2024 dengan menggunakan pendekatan proses yang teknokratik, politik, partisipatif, atascawah (top-down), dan bawah-atas (bottom-up) dengan pendekatan substansial yang Holistik, Tematik, Integratif, dan Spasial.

BNN menjabarkan Visi tersebut dalam Misi BNN Tahun 2024, yaitu:

- a. Memberantas peredaran gelap dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika secara profesional.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi dan pemberdayaan ketahanan masyarakat terhadap kejahatan Narkotika.
- c. Mengembangkan dan memperkuat kapasitas kelembagaan.

BNN sebagai vocal point penanggulangan Narkoba di tanah air, menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh unit kerja BNN.

Tujuan Organisasi BNN sebagaimana disebutkan dalam Renstra BNN 2020-2024 terdiri dari 2 tujuan, yakni:

1. Melindungi dan Menyelamatkan Masyarakat dari Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah meningkatnya penanganan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Tujuan dan sasaran strategis

tersebut dalam rangka mewujudkan masyarakat yang merasa terlindungi dan terselamatkan dari bahaya ancaman narkoba.

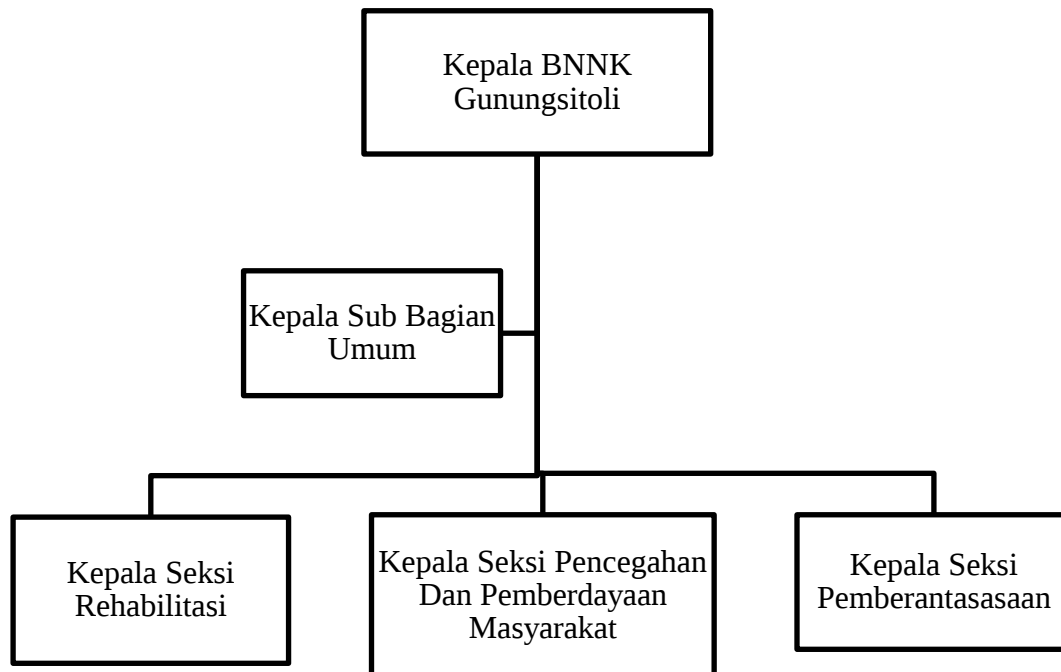
Dalam hal ini, upaya penguatan ketahanan masyarakat harus terus ditingkatkan. Selain itu pengintegrasian upaya pencegahan dan pemberantasan sangat penting untuk terus ditingkatkan dalam rangka melemahkan pasar terutama dari sisi supply, melalui tindakan penangkapan dan pemberantasan jaringan pasar narkoba, pengungkapan jaringan dan penyitaan barang bukti beserta aset tersangka peredaran gelap narkoba.

2. Mewujudkan Transformasi Layanan Publik yang Berkualitas.

Sasaran strategis dari tujuan tersebut adalah terwujudnya manajemen organisasi yang profesional, produktif, dan proporsional serta berkinerja tinggi. Tujuan dan sasaran strategis ini merepresentasikan fokus kinerja kelembagaan BNN yang berorientasi pada hasil kinerja yang dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

Penguatan kelembagaan yang profesional dan berkinerja tinggi ini akan memberikan wajah transformatif kelembagaan yang berdampak terhadap peningkatan pelayanan publik di lingkungan BNN. Tujuan dan sasaran strategis tersebut merupakan fokus yang harus dicapai BNN bersama seluruh perangkat organisasinya baik tingkat pusat, provinsi, dan Kota/kota. Dalam hal ini, BNNK Gunungsitoli sebagai salah satu unit organisasi BNN berkewajiban mengerahkan seluruh sumber daya dan kekuatannya untuk mencapai target organisasi yang telah ditetapkan.

Gambar 4.1:
Struktur Organisasi BNN
Kota Gunungsitoli



Sumber: BNN Kota Gunungsitoli, 2022

1.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 25 pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli. Karakteristik responden dideskripsikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pendidikan.

1.2.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Dari hasil yang didapatkan saat pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner, berikut ini responden berdasarkan jenis kelamin pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2.1 Presentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.

Karyawan Laki-laki	Jumlah Responden	Presentase
--------------------	------------------	------------

19	25	76%
Karyawan Wanita	Jumlah Responden	Presentase
6	25	24%

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Gambar 4.2.1 memberikan informasi bahwa pegawai pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli didominasi oleh laki-laki dengan jumlah karyawan laki-laki 76% dari seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli. Jumlah karyawan perempuan pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli adalah 24%. Secara umum, laki-laki dipersepsikan sebagai sosok yang dipercaya dalam melakukan pekerjaan yang melibatkan lingkungan masyarakat yang pada umumnya pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang cukup melibatkan interaksi.

1.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Karakteristik responden yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Berikut responden berdasarkan usia pada Tabel 4.2.2 sebagai berikut:

Tabel 4.2.2 Presentase Responden Berdasarkan Usia

Rentang Usia	Jumlah Responden	Presentase
<20	0	0
20-29	5	20%
30-39	11	44%
40-49	5	20
>50	4	16
Total	25	100%

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Tabel 4.2.2 memberikan informasi bahwa umumnya pegawai di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli berusia pada rentang 30-39 tahun. Proporsi pegawai terbanyak juga berada pada rentang usia tersebut.

Sebanyak 20% dari pegawai berada pada rentang usia 20-29 tahun, 20% pegawai pada rentang usia 40-49 tahun, dan >50 tahun sebanyak 16% pegawai.

Hal ini menandakan bahwa Badan Narkotika Nasional kota Gunungsitoli pegawai yang dimilikinya dari segi umur, terbilang dapat diandalkan hal ini disebabkan rentang usia yang muda dapat membuat pekerjaan menjadi lebih produktif dan efisien.

1.2.3 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Karakteristik responden yang diperoleh dari hasil pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner. Berikut responden berdasarkan pendidikan pada Gambar 4.2.3 berikut :

Tabel 4.2.3 Presentase Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan Terakhir

Tingkat Pendidikan	Jumlah Responden	Presentase
SD	0	0
SMP	0	0
SMA	15	60%
S1	10	40%
D3	0	0
Jumlah	25	100%

Sumber: Hasil Penelitian (2022)

Dari Tabel 4.2.3 karakter responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir pegawai dari Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli dapat dilihat didominasi oleh tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas dengan presentas sebanyak 60%, disusul oleh tingkat pendidikan Strata 1 dengan presentase 40%.

Dapat disimpulkan bahwa pada pegawai dari Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli didominasi pendidikan SMA, karena dengan

latar belakang pendidikan tersebut lebih mudah untuk diarahkan, dibimbing dan dilatih untuk membuat lebih bisa berbaur kepada masyarakat. Pada umumnya sistem perekrutan di Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli tidak memprioritaskan pendidikan tetapi keahlian dan kemampuan dalam bidang yang diperlukan pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli. Dan perekrutan pegawai pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli tidak direkrut langsung oleh Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli, melainkan mengikuti tes langsung yang diadakan oleh pemerintah pusat dan lembaga kepolisian Negara Indonesia.

1.3 Analisa Data Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan oleh peneliti, yang tentunya instrumen yang telah diujikan kepada sampel penelitian ini yakni masyarakat yang mengurus surat keterangan bebas narkoba di BNN Kota Gunungsitoli selama rentang waktu penelitian dengan jumlah 25 orang. Seterusnya, peneliti memperoleh data melalui sebaran angket kepada 25 orang responden tersebut tersebut, sebagai berikut:

1.3.1 Verifikasi Data

Seperti kita ketahui bahwa verifikasi data bertujuan untuk mengecek angket apakah telah sesuai atau memenuhi standar verifikasi yang valid (memenuhi syarat untuk diolah). Dari jumlah angket yang telah diedarkan kepada responden sebanyak 25 orang, yakni masyarakat yang mengurus surat keterangan bebas narkoba di BNN Kota Gunungsitoli selama rentang waktu penelitian dengan jumlah 25 orang telah diisi dan dikembalikan sesuai dengan petunjuk yang diharapkan oleh peneliti, untuk selanjutnya diolah sebagai berikut.

1.3.2 Hasil Data Responden Pada Variabel X

Pengolahan angket merupakan langkah awal dalam merekapitulasi jawaban pada setiap alternatif jawaban sesuai dengan angket yang telah diedarkan kepada responden.

Dari hasil angket yang telah peneliti bagikan kepada para responden secara tertutup, yang dimana angket tersebut memiliki empat opsi jawaban yang dimana setiap opsi memiliki skor bobot.

Jumlah soal angket pada variabel X adalah sebanyak sepuluh soal , dari masing-masing soal diperoleh jawaban dari masing-masing responden dengan skor sebagai berikut:

Tabel 4.1
Hasil Total Skor Angket Pada Variabel X

No. Responden	Kompetensi X										Total (Y)
	X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	X.6	X.7	X.8	X.9	X.10	
1	3	2	2	3	2	2	3	3	3	4	27
2	4	3	3	3	3	3	4	2	2	3	30
3	3	2	2	4	4	3	3	2	3	2	28
4	3	2	3	3	3	3	4	3	4	3	31
5	3	3	3	3	3	3	3	2	3	4	30
6	3	2	3	3	2	2	3	3	3	3	27
7	3	2	3	2	1	3	3	3	3	3	26
8	3	2	2	3	3	3	4	3	3	2	28
9	4	3	2	3	3	3	3	3	3	3	30
10	4	3	2	3	2	4	4	3	3	4	32
11	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	33
12	3	3	3	2	3	3	3	2	3	2	27
13	4	2	2	4	3	3	3	3	3	4	31
14	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	31
15	4	2	2	3	3	3	2	2	3	3	27
16	3	3	2	3	2	4	4	3	3	3	30
17	3	3	1	3	3	3	3	3	3	3	28
18	3	3	2	3	3	3	3	2	3	3	28
19	2	2	2	2	3	3	2	3	3	3	25
20	4	3	3	3	4	4	3	3	4	4	35
21	3	3	2	3	3	4	3	3	3	2	29
22	4	3	3	2	2	3	4	3	3	3	30
23	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	36
24	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	32
25	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	32

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Peneliti (2022)

1.3.3 Hasil Data Responden Pada Variabel Y

Pengolahan angket merupakan langkah awal dalam merekapitulasi jawaban pada setiap alternatif jawaban sesuai dengan angket yang telah diedarkan kepada responden.

Dari hasil angket yang telah peneliti bagikan kepada para responden secara tertutup, yang dimana angket tersebut memiliki empat opsi jawaban yang dimana setiap opsi memiliki skor bobot.

Jumlah soal angket pada variabel X adalah sebanyak sepuluh soal , dari masing-masing soal diperoleh jawaban dari masing-masing responden dengan skor sebagai berikut:

Tabel 4.2.

Hasil Total Skor Angket Pada Variabel X

No. Responden	Kesadaran Masyarakat Y										Total (Y)
	Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Y.6	Y.7	Y.8	Y.9	Y.10	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	30
2	2	3	4	3	2	3	3	3	3	1	27
3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	2	27
4	3	3	3	2	3	4	4	4	3	3	32
5	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	28
6	3	3	3	2	3	2	3	2	3	2	26
7	3	2	3	3	3	2	3	3	2	2	26
8	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	28
9	3	2	3	4	4	2	3	2	3	3	29
10	3	3	3	3	3	2	4	3	3	3	30
11	3	3	3	2	4	3	3	3	3	3	30
12	3	2	4	3	4	4	4	3	3	3	33
13	3	3	3	3	3	3	4	3	3	2	30
14	3	2	3	3	3	3	3	3	3	4	30
15	3	3	3	3	3	3	3	4	3	2	30
16	3	3	3	2	4	3	3	3	4	3	31
17	3	2	3	2	3	2	3	3	3	4	28
18	3	3	3	3	3	2	2	3	3	3	28
19	3	4	3	2	3	3	2	3	3	3	29
20	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	37
21	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	33
22	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	33
23	4	3	4	3	3	3	3	3	4	3	33

24	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	31
25	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	32

Sumber: Hasil Penelitian, Olahan Peneliti (2022)

1.3.4 Uji Validitas Pada Variabel X

Untuk menguji validitas pada setiap butir soal peneliti menggunakan bantuan program komputer SPSS For Windows Versi 20.0. untuk melakukan uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan nilai r tabel.

Yang dimana pada penelitian ini nilai r tabel dapat dilihat dari degree of freedom (df) = $n - k$, $df = 25 - 2$, $df = 23$. maka didapatkan nilai dari $df = 23$ dengan tingkat signifikansi 0,05 didapatkan nilai r tabel = 0,3961.

Syarat dari pengujian validitas yaitu jika nilai dari r hitung positif dan lebih besar dari nilai r tabel maka butir soal dapat dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Butir Soal Variabel X

Butir Soal	Pearson Correlation	R- Tabel	Sig. (2-tailed)
x_1	,509**	0,3961	0,001
x_2	,547**	0,3961	0,005
x_3	,402*	0,3961	0,005
x_4	,476*	0,3961	0,002
x_5	,443*	0,3961	0,003
x_6	,462*	0,3961	0,002
x_7	,424*	0,3961	0,003
x_8	,468*	0,3961	0,002
x_9	,588**	0,3961	0,002
x_10	,503*	0,3961	0,001

Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, olahan SPSS Versi 20.0 (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil analisis uji validitas dengan bantuan program komputer SPSS For Windows Versi 20.0, setiap butir soal pada variabel X memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,3961.

Yang berarti setiap butir soal pada variabel X dinyatakan valid. (Untuk hasil total perhitungan SPSS dapat dilihat pada lampiran).

1.3.5 Uji Validitas Pada Variabel Y

Untuk menguji validitas pada setiap butir soal peneliti menggunakan bantuan program komputer SPSS For Windows Versi 20.0. untuk melakukan uji validitas dilakukan dengan cara membandingkan r hitung dengan nilai r tabel.

Yang dimana pada penelitian ini nilai r tabel dapat dilihat dari degree of freedom (df) = $n - k$, $df = 25 - 2$, $df = 23$. maka didapatkan nilai dari $df = 23$ dengan tingkat signifikansi 0,05 didapatkan nilai r tabel = 0,3961.

Syarat dari pengujian validitas yaitu jika nilai dari r hitung positif dan lebih besar dari nilai r tabel maka butir soal dapat dinyatakan valid.

Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Butir Soal Variabel X

Butir Soal	Pearson Correlation	R- Tabel	Sig. (2-tailed)
y_1	,397*	0,3961	0,005
y_2	,427*	0,3961	0,003
y_3	,501*	0,3961	0,001
y_4	,414*	0,3961	0,004
y_5	,505**	0,3961	0,001
y_6	,721**	0,3961	0,000
y_7	,452*	0,3961	0,002
y_8	,536**	0,3961	0,001
y_9	,468*	0,3961	0,002
y_10	,416*	0,3961	0,004

Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, olahan SPSS Versi 20.0 (2022)

Dari tabel diatas dapat dilihat hasil analisis uji validitas dengan bantuan program komputer SPSS For Windows Versi 20.0, setiap butir soal pada variabel Y memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel yakni 0,3961.

Yang berarti setiap butir soal pada variabel Y dinyatakan valid. (Untuk hasil total perhitungan SPSS dapat dilihat pada lampiran).

1.3.6 Uji Realibilitas Variabel X

Uji realibilitas pada penelitian ini adalah menggunakan Croanbach Alpha. Adapun syarat dimana suatu alat ukur dapat dikatakan reliable adalah dimana nilai dari croanbach alpha lebih dari 0,60. Hasil pengujian realibilitas dengan

bantuan program komputer SPSS Versi 20.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.5
Hasil Uji Realibilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,619	10

Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, olahan SPSS Versi 20.0 (2022)

Dari tabel diatas hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa variabel X mempunyai nilai koefisien alpha yang cukup besar yaitu 0,619. Sesuai dengan syarat suatu alat ukur dapat dikatakan realible jika nilai koefisien alpha $>0,60$. Sehingga dari hasil uji realibilitas variabel X yang nilai koefisien alpha nya 0,619 dinyatakan realible.

1.3.7 Uji Realibilitas Variabel Y

Uji realibilitas pada penelitian ini adalah menggunakan Croanbach Alpha. Adapun syarat dimana suatu alat ukur dapat dikatakan reliable adalah dimana nilai dari croanbach alpha lebih dari 0,60. Hasil pengujian realibilitas dengan bantuan program komputer SPSS Versi 20.0 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.6
Hasil Uji Realibilitas Variabel X

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,626	10

Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, olahan SPSS Versi 20.0 (2022)

Dari tabel diatas hasil uji realibilitas menunjukkan bahwa variabel Y mempunyai nilai koefisien alpha yang cukup besar yaitu 0,626. Sesuai dengan syarat suatu alat ukur dapat dikatakan realible jika nilai koefisien

alpha >0,60. Sehingga dari hasil uji realibilitas variabel Y yang nilai koefisien alpha nya 0,626 dinyatakan realible.

1.3.8 Uji Koefisien Korelasi Dan Determinasi

Adapun kriteria taraf signifikan dijabarkan sebagai berikut:

0,00-0,199 tingkat hubungan sangat lemah

0,20-0,399 tingkat hubungan lemah

0,01-0,599 tingkat hubungan cukup

0,60-0,799 tingkat hubungan kuat

0,80-1,00 tingkat hubungan sangat kuat

Untuk menguji dan membuktikan secara statistik pengaruh dari lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai, maka peneliti melakukan uji korelasi product moment dan uji determinasi dengan bantuan aplikasi SPSS Versi 20.0.

Tabel 4..7

Hasil Uji Koefisien Korelasi dan Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,690 ^a	,649	,320	2,148

a. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, olahan SPSS Versi 20.0 (2022)

Dari tabel diatas menunjukan pengaruh antara kompetensi pegawai terhadap kesadaran masyarakat terdapat koefisien korelasi sebesar 0,690. Hal tersebut menandakan bahwa ada korelasi positif antara kompetensi pegawai terhadap kesadaran masyarakat yang tingkat hubungannya kuat. Dan didapatkan juga nilai dari koefisien determinasi sebesar 0,649 yang dimasukkan kedalam rumus:

$$KD = r_{xy}^2 \times 100\%$$

$$KD = 0,649 \times 100\%$$

$$KD = 64,9\%$$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari variabel bebas (kompetensi pegawai) terhadap variabel terikat (kesadaran masyarakat) sebesar 64,9%.

1.3.9 Uji Regresi Linear Sederhana

Pengujian analisis statistik regresi linear sederhana pada penelitian ini menggunakan bantuan program komputer SPSS For Windows Versi 20.0. Yang dimana hasil pengolahan data menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	56,801	1	56,801	12,306	,002 ^b
	Residual	106,159	23	4,616		
	Total	162,960	24			

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

b. Predictors: (Constant), TOTAL_X

Sumber: Hasil Penelitian Peneliti, olahan SPSS Versi 20.0 (2022)

Pada tabel diatas menjelaskan bahwa F hitung = 12,306 dengan tingkat signifikansi / probabilitas $0,000 < 0,002$, maka model regresi dapat berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat .

1.3.10 Uji Hipotesis

Uji T digunakan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari setiap variabel independen terhadap variabel dependen yang diuji pada taraf signifikan 0,05 atau 5%. Secara teknis pengujiannya dilakukan perbandingan antara nilai t hitung dengan nilai t tabel.

Untuk mengetahui pengaruh variabel X terhadap variabel Y dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.9
Hasil Uji Hipotesis (Uji T)

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	13,206	4,818		,012
	TOTAL_X	,566	,161	,590	,002

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Berdasarkan hasil uji T diatas Variabel X kompetensi pegawai diperoleh nilai thitung = 3,508 dengan tingkat signifikansi 0,002. Dengan menggunakan batas signifikansi 0,05 didapat t tabel sebesar 1,708. Yang menandakan bahwa thitung > t tabel , yang berarti H_0 ditolak H_a diterima.

Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_a :Ada Pengaruh kompetensi pegawai Terhadap kesadaran masyarakat Pada Badan Narkotika Nasional Daerah Kota Gunungsitoli.

H_0 :Tidak Ada Pengaruh kompetensi pegawai Terhadap kesadaran masyarakat Pada Badan Narkotika Nasional Daerah Kota Gunungsitoli.

Dengan demikian hipotesis diterima yang menandakan arah koefisien regresi positif berarti kompetensi pegawai berpengaruh positif yang signifikan terhadap kesadaran masyarakat.

1.4 Analisa Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan didasari oleh latar belakang pada penelitian sebagaimana yang tercantum pada Bab I, yang dimana berangkat dari masalah yang terjadi pada lokasi penelitian yang kemudian membuat peneliti tertarik untuk mengetahui pengaruh dari kompetensi pegawai Terhadap kesadaran masyarakat Pada Badan Narkotika Nasional Daerah Kota Gunungsitoli.

Hingga akhirnya peneliti memperoleh atau mencari teori-teori yang dapat menunjang peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga peneliti dapat merumuskan permasalahan, mencari tujuan penelitian, merumuskan hipotesis dan dapat menyusun angket/kuesioner yang akhirnya dapat disebarkan kepada para responden.

Adapun tujuan dari penelitian ini yang terdapat pada bab 1 adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kesadaran Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Daerah (BNNK) Kota Gunungsitoli.
2. Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Kompetensi Pegawai terhadap Kesadaran Masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Daerah (BNNK) Kota Gunungsitoli.

Yang kemudian hasil analisa data penelitian yang akhirnya peneliti olah dengan teknik analisis data pada penelitian yang dibantu oleh program komputer SPSS Versi 20.0 untuk menguji data tersebut mendapatkan hasil. Yang dimana variabel pada penelitian ini ada dua yaitu variabel X (Kompetensi Pegawai) dan variabel Y (Kesadaran Masyarakat) .

Yang pertama peneliti melakukan pengujian terhadap setiap item pertanyaan yang ada angket, apakah setiap butir soal yang peneliti siapkan dapat mengukur yang sebenarnya dapat diukur dari setiap butir soal tersebut. Yang dimana peneliti mendapatkan hasil setiap item butir soal yang digunakan pada masing-masing variabel pada angket dinyatakan valid. Dimana didapatkan nilai dari r hitung $>$ dari pada nilai dari r tabel. Selanjutnya dengan uji realibilitas, dimana dari hasil analisa data dari uji yang peneliti lakukan, peneliti mendapatkan nilai dari croanbach alpha $> 0,60$.

Setelah melakukan pengujian hipotesis dan diperoleh hasil bahwa hipotesis H_a diterima dan Hipotesis H_o ditolak yang berarti yaitu Ada Pengaruh kompetensi pegawai Terhadap kesadaran masyarakat Pada Badan Narkotika Nasional Daerah Kota Gunungsitoli. Berdasrkan hasil penelitian diperoleh hasil jawaban sementara dari uji hipotesis telah dibuktikan dengan perhitungan perhitungan kehandalan koefisien korelasi dengan statistik uji t dengan $dk = 23$ pada taraf disignifikan $\alpha = 0,05$ dimana t hitung $>$ t tabel yaitu $3,508 > 1,708$. Kenyataan yang diperoleh dari penelitian ini adalah Pengaruh kompetensi pegawai Terhadap kesadaran masyarakat Pada Badan Narkotika Nasional Daerah Kota Gunungsitoli hal ini dapat dibuktikan dengan hasil Uji Koefisien Determinsi yang mendapatkan nilai $0,649$ yang berarti Variabel X (kompetensi pegawai) memberikan kontribusi pengaruh terhadap kesadaran masyarakat sebesar $64,9\%$ dan $35,1\%$ lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak turut diteliti pada penelitian ini.

Dari hasil analys data yang telah dilakukan maka didapatkan bahwa seluruh tujuan dan rumusan masalah pada penelitian ini terjawab. Dimana ternyata dari hasil uji regresi linear sederhana didapatkan bahwa pengaruh kompetensi pegawai

ternyata berpengaruh terhadap kesadaran masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli. Dengan demikian tujuan penelitian untuk mengetahui apakah ada pengaruh kompetensi pegawai terhadap kesadaran masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli terjawab.

Dari hasil uji hipotesis (uji t) didapatkan bahwa hipotesis yang diterima adalah H_0 , dimana ada pengaruh kompetensi pegawai terhadap kesadaran masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli.

Dari hasil uji koefisien Determinasi didapatkan bahwa kompetensi pegawai memiliki pengaruh atau kontribusi terhadap kesadaran masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli sebesar 64,9%. Dengan demikian tujuan penelitian untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari kompetensi pegawai terhadap kesadaran masyarakat pada Badan Narkotika Nasional Kota Gunungsitoli terjawab.

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa segala masalah dan tujuan dari penelitian ini telah dapat terjawab dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

Penelitian ini tidak luput dari kekurangan, semoga kelak pada penelitian selanjutnya dapat lebih didalami dan membahas lebih luas lagi